

Analysis Of the Presentation of Financial Statements and Realization of the APBDes Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. South Bengkulu

Analisis Penyajian Laporan Keuangan dan Realisasi APBDes Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan

Nopita Sari ¹⁾; Yun Fitriano²⁾; Rinto Noviantoro²⁾

¹⁾Study Program of Accountancy, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

²⁾ Department of Accountancy, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ novita260819@gmail.com; ²⁾ yun.fitriano@gmail.com; ²⁾ rintonoviantoro@yahoo.co.id;

ARTICLE HISTORY

Received [10 Agustus 2021]

Revised [25 Agustus 2021]

Accepted [15 September 2021]

KEYWORDS

Financial Reports, Realization of Village Budget Revune.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan dan realisasi APBDes Tanjung negara Kec. Kedurang kab. Bengkulu Selatan Tahun 2019 berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018. Jenis penelitian ini deskripsi komparasi, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentas, sedangkan teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian analisis deskripsi komparasi yaitu pengumpulan data, membandingkan, menganalisis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyajian laporan keuangan dan realisasi APBDes tanjung negara kec. kedurang kab. Bengkulu selatan telah berpodaman dengan permendagri no 20 tahun 2018 namun masih di temukan kekerangan yaitu tidak adanya Bantuan keuangan kabupaten Bengkulu selatan dan bantuan keuangan provinsi, yang tidak tertera pada laporan realisasi APBDes.Selanjutnya di laporan keuangan Desa Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan tidak adanya bantuan keuangan kabupaten dan bantuan keuangan provinsi, Aset Desa Pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang lengkap seperti pada Peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the suitability of the presentation of financial statements and the realization of the Regional Budget of Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan Year 2019 based on Permendagri No. 20/2018 This type of research is comparative description, data collection methods are observation, interviews, documentation, while the data analysis techniques used in comparative description analysis research are data collection, comparing, analyzing, and drawing conclusions. the results of this study found that the presentation of financial reports and the realization of the APBDes Tanjung Negara kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan has cooperated with Minister of Home Affairs Regulation No. 20/2018 but still found difficulties, namely the absence of financial assistance from South Bengkulu district and provincial financial assistance, which are not listed in the APBDes realization report. Furthermore, in the financial report of Desa Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. South Bengkulu does not have district financial assistance and provincial financial assistance, Village Assets in the Notes to Complete Financial Statements as in the Regulation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018.

PENDAHULUAN

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa (Iqsan, 2016). Menurut Virgie, (2013: 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes). Laporan keuangan desa adalah hasil akhir dari sebuah proses pencatatan transaksi keuangan yang di laksanakan oleh aparatur desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.Widjaja (2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Bintarto (1983:11-12) dalam Luthfia (2013), desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, social, ekonomis, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Menurut undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, desa memiliki wewenang yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Berdasarkan kedua definisi di

atas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan tempat berkembangnya suatu pemerintahan yang di atur dalam hokum yang jelas.

Pengelolaan keuangan desa kembali di ubah. Perubahan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 april 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal 8 mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 4 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut laporan keuangan desa pada Tahun 2019 apakah sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Desa Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu selatan yang juga menerapkan sistem pelaporan keuangan berdasarkan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

LANDASAN TEORI

Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan berarti suatu proses penguraian data (informasi) yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap komponen, dan mempelajari hubungan antar komponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang informasi tersebut. Najmudin (2011:66). Analisis laporan keuangan merupakan salah satu untuk cara mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode. Kasmir (2010:66).

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat oleh pihak manajemen untuk memberikan gambaran atau *progress report* secara periodik. Karena itu, laporan keuangan mempunyai sifat historis dan menyeluruh. Laporan keuangan sebagai *progress report* terdiri atas data yang merupakan kombinasi antara fakta yang telah dicatat (*recorded fact*), prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, dan *personal judgement*. Najmudin (2011:66) Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa. Laporan akhir pun disajikan dalam nilai uang.

Penyajian Laporan Keuangan

IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang wajib serta khusus dilakukan oleh bendahara desa dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa. bendahara desa pun harus jeli perihal melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan yang mengakibatkan terjadinya suatu transaksi keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baik itu berupa pendapatan ataupun belanja desa. Jurnal akuntansi yang digunakan oleh bendahara desa dalam hal penatausahaan keuangan desa adalah Buku Umum, Buku Pajak serta Buku Kas Pembantu Pajak.

Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan berintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan membuat pemerintah desa akan memperoleh dana yang cukup besar dan harus dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Desa

Pegelolaan keuangan desa secara teknis berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 29 Pengelolaan keuangan Desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pasal 30 (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas. (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan. mekanisme penyusunan dan penetapan rancangan APBDes Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Selanjutnya, Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa. Selanjutnya, rancangan APBDes tersebut kemudian dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Perdes tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan metode deskripsi komparasi. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian pada suatu obyek yang diteliti sebagai suatu kasus di suatu tempat. Data yang akan digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara serta dokumentasi, sedangkan untuk data sekunder adalah data yang berasal dari laporan pelaksanaan realisasi APBDes. Kemudian data tersebut dan informasi yang didapatkan akan diolah dengan cara dibandingkan dan di analisis. Dalam Penelitian ini subyek penelitiannya adalah informan yang berkaitan dengan data penelitian, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan. Dalam penelitian ini obyek penelitian yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBDes serta dokumen pendukungnya yang ada di Desa Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Perbandingan Laporan Keuangan dan Realisasi APBDes Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan Berkaitan dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

No	INDIKATOR	PERMENDAGRI NO.20 TAHUN 2018	DESA TANJUNG NEGARA KEC. KEDURANG KAB. BENGKULU SELATAN	PRAKTIK		KESIMPULAN
				SESUAI	TIDAK	
1.	Laporan Keuangan Desa Tanjung Negara Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan	Pasal 29 Pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban	Laporan keuangan dan realisasi APBDes desa tanjung kec. kedurang kab. Bengkulu selatan berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018. pada tahap perencanaan desa tanjung negara telah melakukan rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa ketua dan anggota BPD perangkat desa dan tokoh masyarakat pada tahun pelaksanaan telah membuat catatan keuangan dan bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran adanya pelaporan dokumen rencana anggaran biaya (RAB) pada tahap penatausahaan desa	Sesuai		Dari hasil peneliti dan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa penyajian laporan keuangan dan realisasi APBDes Desa tanjung negara kec. kedurang kab. Bengkulu selatan telah berpedoman dengan permendagri No 20 Tahun 2018, hanya saja masih terdapat kekurangan yaitu pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa. pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tidak adanya bantuan keuangan kabupaten Bengkulu selatan dan bantuan keuangan provinsi, yang tertera pada Permendagri No 20 Tahun 2018.
2.	Realisasi APBDes Desa Tanjung Negara Kecamatan kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan	Rincian pos Laporan Keuangan : 1.Rekonsiliasi SILPA dan kas 2.Pendapatan asli desa 3.Dana desa 4.bagian dari hasil pajak dan Retribusi daerah 5.Alokasi dana desa 6.Bantuan Keuangan provinsi 7. Bantuan keuangan kabupaten kota 8.pendapatan lain lain		Sesuai		

		9. Belanja Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa 10. Belanja – bidang pembangunan desa 11. belanja-bidang pembinaan kemasyarakatan desa 12. belanja bidang pemberdayaan masyarakat 13. belanja bidang bencana, keadaan darurat dan mendesak desa 14. belanja desa dalam klasifikasi ekonomi a. belanja pegawai b. belanja barang dan jasa c. belanja modal 15. Belanja desa dalam klasifikasi Sub Bidang (fungsi) a. bidang penyelenggaraan pemerintah desa b. bidang pembangunan desa c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa d. bidang-bidang pemberdayaan masyarakat desa e. belanja-bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. 16. Pembiayaan a. penerimaan pembiayaan b. pengeluaran pembiayaan 17. Aset Desa a. Tanah b. peralatan, mesin dan alat berat c. kendaraan d. gedung dan bangunan e. jalan f. jembatan g. irigasi/embung h. Aset tetap 18. Peryetaan modal desa - BUMDes xxx 19. dst	tanjung negra memberikan amanat kepada kaur keuangan untuk melaksankanya dan adanya pertanggungjawaban laporan kepada kepala desa. Rincian pos laporan keuangan desa tanjung negara terdiri dari: Rekonsiliasi SILPA, Pendapatan asli desa, Dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, Alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, pendapatan lain lain, belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja bidang pembangunan desa, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa, belanja bidang keadaan darurat dan mendesak desa, belanja desa dalam klasifikasi dsb bidang, pembiayaan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. jadi pos laporan keuangan desa tanjung negara sesuai dengan peraturan permendagri no 20 tahun 2019. Hanya saja masih terdapat kekurangan yaitu pada format laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tidak adanya bantuan keuangan kabupaten kota, belanja desa dalam klasifikasi ekonomi, asset desa seperti tanah dll yang tertera pada Permendagri No 20 tahun 2018. selanjutnya berdasarkan penyajian laporan realisasi APBDes desa tanjung negara kec. kedurang Kab. Bengkulu selatan terdapat beberapa yang mesti diperbaiki yaitu pada laporan realisasi APBDes tidak adanya Bantuan keuangan kabupaten Bengkulu selatan dan bantuan keuangan provinsi yang tertera pada Permendagri No 20 Tahun 2018.	sesuai		Di dalam laporan keuangan Desa Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan tidak adanya bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan provinsi, Aset Desa pada catatn atas laporan keuangan yang lengkap seperti pada peraturan permendagri no 20 tahun 2018
--	--	---	--	--------	--	---

Sumber: Penelitian dan diolah, 2021

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa laporan keuangan dan realisasi APBDes Desa Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan Berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan Permendagri no 20 Tahun 2018. bahwa penyajian laporan keuangan dan realisasi APBDes Desa tanjung negara kec. kedurang kab. Bengkulu selatan telah berpedoman dengan permendagri No 20 Tahun 2018, hanya saja

masih terdapat kekurangan yaitu pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa. pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tidak adanya bantuan keuangan kabupaten Bengkulu Selatan, belanja desa dalam klasifikasi ekonomi, aset desa, seperti tanah dll yang tertera pada Permendagri No 20 Tahun 2018. selanjutnya berdasarkan penyajian laporan realisasi APBDes desa tanjung negara kec. kedurang Kab. Bengkulu selatan terdapat beberapa yang mesti diperbaiki yaitu pada laporan realisasi APBDes tidak adanya peryetaan modal desa dan belanja desa dalam klasifikasi ekonomi yang tidak lengkap seperti yang tertera pada Permendagri No 20 Tahun 2018

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas Laporan keuangan dan Realisasi APBDes Desa Tanjung Negara telah berjalan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 namun masih ditemukan kekurangan-kekurangan sebagai berikut :

Penyajian Pada Pelaporan Keuangan Realisasi APBDes

Pada Laporan keuangan Desa Tanjung Negara Tahun 2019 mencakup laporan Rencana Anggaran Desa (RAB) dan anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang Telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mana semua anggaran diajukan berdasarkan Rencana Anggaran Desa (RAB) agar dapat di bahas dalam rapat desa, sehingga dana yang diajukan dapat disesuaikan dengan anggran desa yang tersedia. pada pemyajian laporan keuangan realisasi APBDes tidak adanya bantuan keuangan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bantuan Keuangan Provinsi yang tertera pada Permendagri No 20 Tahun 2018. Di dalam Laporan Keuangan Desa Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan tidak adanya bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan provinsi, Aset Desa, pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang lengkap seperti pada Peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018 Seharusnya di dalam laporan tersebut ada sesuai Peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018

Contoh misalnya pada Aset Desa harus ada catatan atas laporan keuangan seperti seberikut : Tanah, Peralatan, Mesin, Alat Berat, kendaraan, gedung, bangunan, jalan, jembatan, irigasi/embung/air sungai/drainase, jaringan/instalasi, dan aset tetap lainnya dan juga pada belanja desa dalam klasifikasi ekonomi seharusnya ada catatan atas laporan keuangan seperti : belanja modal, belanja modal pengadaan tanah, belanja modal kendaraan, gedung, bangunan, modal jalan, jembatan, irigasi/embung/air sungai, jaringan instalasi, dan modal lainnya. Laporan keuangan dan realiasi APBDes desa tanjung kec. kedurang kab. Bengkulu selatan berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018. pada tahap perencanaan desa tanjung negara telah melakukan rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa ketua dan anggota BPD perangkat desa dan tkokh nmasyarakat pada tahun pelaksanaan telah mebuat catatan keuangan dan buktipenerimaan dan pengeluaran anggaran adanya pelaporan dokumen rencana anggaran biaya (RAB) pada tahap penatausahaan desa tanjung negra meberikan amanat kepada kaur keuangan untuk melaksankanya dan adanya pertanggungjawaban laporan kepada kepala desa Rincian pos laporan keuangan desa tanjung negara terdiri dari: Rekonsiliasi SILPA.

Pendapatan asli desa, Dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, Alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, pendapatan lain lain, belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja bidang pembangunan desa, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa, belanja bidang keadaan darurat dan medesak desa, belanja desa dalam klasifikasi dsub bidang ,pembiayaan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. jadi pos laporan keuangan desa tanjung negara sesuai dengan peraturan permendagri no 20 tahun 2019. Hanya saja masih terdapat kekurangan yaitu pada format laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tidak adanya bantuan keuangan kabupaten kota, belanja desa dalam klasifikasi ekonomi, aset desa seperti tanah dll yang tertera pada Permendagri No 20 tahun 2018. selanjutnya berdasarkan penyajian laporan realisasi APBDes desa tanjung negara kec. kedurang Kab. Bengkulu selatan terdapat beberapa yang mesti diperbaiki yaitu pada laporan realisasi APBDes tidak adanya Bantuan keuangan kabupaten Bengkulu selatan dan bantuan keuangan provinsi yang tertera pada Permendagri No 20 Tahun 2018.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyajian Laporan Keuangan dan realisasi APBDes Desa Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan telah berpedoman dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, hanya saja masih terdapat kekurangan yaitu pada laporan realiasi anggaran pendapatan dan belanja desa. pada laporan realisasi

anggaran pendapatan dan belanja desa tidak adanya bantuan keuangan kabupaten Bengkulu Selatan, dan Bantuan Keuangan Provinsi yang tertera pada Permendagri No 20 tahun 2018. Selanjutnya Di dalam Laporan Keuangan Desa Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan tidak adanya bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan provinsi, Aset Desa, pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang lengkap seperti pada Peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Saran

1. Kepada kepala desa di desa Tanjung Negara Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu disarankan kiranya mengangkat Bendahara atau Kaur Keuangan Desa yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian pada bidang akuntansi terutama.
2. Bagi petugas yang mengelola laporan keuangan Desa Tanjung Negara hendaknya menggunakan format laporan yang sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, sehingga laporan yang diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Iqsan, 2016, Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBIDES) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, Ejournal ilmu pemerintahan Vol. 4 No1, 230-240
- Luthfia, 2013. A.R. Menilik Urgensi Desa di era Otonomi Daerah. *Journal of Rural and Development*. 4(2): 135-145
- Widjaja, 2013. Penyelenggaraan Otonomi Desa di Indonesia. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Suwardjono.2011. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan edisi Ketiga Catatan Ke Lima. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.
- IAI-KASP, 2015. Laporan Keuangan. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo
- Kasmir. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Najmudin,2011. Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah modern. Yogyakarta:ANDL
- Kasmir. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Desa. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa".
- Andriana, 2019. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.Jember.
- Yusuf Muhamad Bahrudin, 2020. Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Klompangan Kecamatan ajung, Kabupaten Jember)
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Jakarta : Salemba empat
- Kartikahadi, dkk. 2012. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS. Jakarta: salemba empat
- Belkaoui, ahmed Riahi, 2011, Accounting Theory : Teori Akuntansi. Edisi Kelima. Jakarta : salemba empat.